

BAB IV

FAKTOR – FAKTOR (LUAR NEGERI) PENDORONG KEBIJAKAN ARIEL SHARON

A. Tekanan Internasional

Selama masa pemerintahan Ariel Sharon pada tahun 2001 ketika Ariel Sharon untuk pertama kalinya menjadi Perdana Menteri Israel dan ketika ia terpilih lagi pada 2003 sampai sekarang, Sharon telah mendapatkan berbagai macam kritikan dan tekanan internasional yang luar biasa karena cara garis kerasnya dalam menangani perlawanan Palestina.

Sejak agresi Israel ke wilayah Palestina pada tanggal 29 Maret 2002 (Operation Defensive Shield), Ariel Sharon mendapatkan tekanan dan kritiknya yang terbesar setelah serangan besar-besaran ke Lebanon yang dikomando oleh Sharon dan menewaskan lebih dari 1000 orang Palestina. Tindakan Ariel Sharon membangun tembok pembatas yang direncanakan akan mengelilingi wilayah Tepi Barat ketika selesai juga tidak kalah dalam mendapatkan kutukan dan kritikan internasional.

Bersamaan dengan itu citra Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah juga mengalami stigma buruk. Bahkan terburuk selama satu dekade terakhir. Kegagalan misi Menlu AS Colin Powell di Timur Tengah turut mempertebal torehan stigma tersebut. Di wilayah negara-negara Arab, sejak agresi Israel ke Tepi Barat dan pengepungan markas besar Pemimpin Palestina Yasser Arafat di

Ramallah tanggal 29 Maret 2002, tidak pernah sepi dari aksi unjuk rasa, pembakaran bendera AS sampai gambar Presiden AS George W. Bush.

Utusan khusus PBB untuk Timur Tengah, Terje Larsen, setelah mengunjungi kamp pengungsi Jenin hari Kamis 18 April 2002 melukiskan kehancuran dahsyat di kamp tersebut jauh melampaui dari yang dibayangkan semula.⁸⁸

Negara-negara Arab dengan media massanya, baik melalui tulisan editorial, opini maupun karikturnya tak henti-hentinya menghujat AS dan menuduh AS telah memberi lampu hijau pada PM Israel Ariel Sharon untuk melancarkan agresinya ke kota-kota dan desa-desa Palestina di Tepi Barat yang telah menyebabkan terjadinya tragedi kemanusiaan di wilayah Palestina itu. Khususnya tragedi kemanusiaan yang terjadi di kamp pengungsi Jenin, kompleks kota lama di kota Nablus, gereja Nativity (gereja kelahiran Jesus Kristus) di Bethlehem serta tentunya markas besar Yasser Arafat sendiri di Ramallah.⁸⁹

Karena tindakan-tindakannya itu, PBB mengeluarkan resolusi-resolusi 1402, 1403 dan 1405 yang mengecam tindakan militer Israel dan menuntut agar Israel segera mundur dari wilayah Palestina yang diduduki.

Konvensi Jenewa keempat pada tanggal 20 Agustus 1949 melarang Kekuatan yang Menduduki (Occupying Power) untuk mentransfer atau memindahkan bagian dari penduduk sipilnya ke dalam wilayah yang didudukinya (artikel 49(6)). Traktat tersebut merupakan jawaban bagi siapa saja yang percaya

⁸⁸ Musthafa Abd. Rahman, *Jejak-Jejak Juang Palestina : Dari Oslo Hingga Intifadah Al Aqsa*, Kompas, Jakarta, Agustus, 2002, hal. 289.

⁸⁹ *Ibid*, hal. 281

bahwa pemukiman Yahudi di Tanah Pendudukan merupakan suatu hal yang ilegal di mata hukum internasional.

Pembangunan dan perluasan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jalur Gaza juga telah dinyatakan ilegal oleh Dewan Keamanan PBB berulang kali. Contohnya yaitu Resolusi 446, 452, 465 dan 471. Karena Resolusi 446 dan 465 tidak dibuat berdasarkan Chapter VII dari Piagam PBB, Israel membantah bahwa tidak ada kekuatan yang mengikat di bawah hukum internasional. Tetapi banyak dari praktisi hukum internasional menyatakan bahwa Resolusi Dewan Keamanan yang berada di luar Chapter VII dapat digunakan sebagai aturan yang mengikat diantara negara anggota PBB. Pemukiman Yahudi juga sering dikecam oleh kelompok hak asasi internasional seperti Amnesty Internasional dan Human Rights Watch.

Ketika pada bulan Maret 2003 AS melakukan serangannya ke Iraq, AS memerlukan dukungan yang penuh dari negara-negara di dunia khususnya negara-negara Arab (Timur Tengah). Dengan alasan tersebut AS berusaha untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi atas serangannya ke Iraq dengan berusaha untuk menciptakan upaya perdamaian antara Israel-Palestina. Upaya perdamaian itu terlihat jelas pada Roadmap yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden George Bush pada tanggal 30 April 2003. Konsep perdamaian itu kemudian mendapat dukungan dan persetujuan dari PBB, Uni Eropa dan Rusia. Roadmap menekankan tentang berdirinya negara Palestina berdampingan dengan negara Israel pada tahun 2005. Tetapi dalam perjalanannya konsep perdamaian itu mengalami kemandekan dan belum dapat diwujudkan. Syarat-syarat yang harus

dipenuhi oleh Palestina adalah menghentikan perlawanannya (Hamas) kepada Israel dan melakukan reformasi politik dan demokratisasi, khususnya atas kepemimpinan Yasser Arafat. Sedangkan syarat yang harus diterima oleh Ariel Sharon (pemerintah Israel) salah satunya adalah menghentikan serangan dan menghentikan semua pembangunan pemukiman di Tepi Barat dan Jalur Gaza, wilayah yang akan dijadikan negara Palestina.

Berkaitan dengan hal itu, AS mempunyai kemampuan yang besar dalam menekan Israel lantaran ketergantungan besar Israel terhadap AS. Di samping tentunya ditopang oleh kekuatan tradisional menyangkut hubungan AS-Israel seperti kekuatan lobi Yahudi di AS dan hubungan strategis AS-Israel dalam semua aspek kehidupan. AS banyak memiliki kartu menghadapi Israel seperti bantuan ekonomi cuma-cuma sebanyak 3,1 milyar dollar AS setiap tahun sejak tercapainya kesepakatan damai Israel-Mesir di Camp David tahun 1979.⁹⁰

Dalam pengalaman politik, AS telah membuktikan kemampuannya menekan Israel ketika Presiden George W. Bush berhasil memaksa Israel ikut hadir dalam forum Konferensi Madrid tahun 1991. Presiden Bush saat itu membekukan kredit untuk Israel sebanyak 10 milyar dollar AS untuk proyek penampungan imigran Yahudi dari Rusia agar Israel bersedia berpartisipasi dalam konferensi damai tersebut. Sebelumnya, AS mampu AS mampu menekan Israel tidak membalas serangan rudal Irak ke kota-kota Israel pada Perang Teluk II. Pada masa Presiden Jimmy Carter, AS mampu menekan Israel menandatangani kesepakatan damai dengan Mesir di Camp David yang membawa resiko Israel

⁹⁰ <http://electronicintifada.net/v2/israellobbywatch.shtml>

harus mundur dari Gurun Sinai. Begitu juga pengaruh AS pada masa pemerintahan George W. Bush sekarang atas Israel tetap tidak berubah/masih sangat besar terhadap pemerintahan Ariel Sharon.

Masalah pemukiman Yahudi pada suatu saat telah menjadi sumber ketegangan antara Israel dan AS. Pada tahun 1993 ada perselisihan antara pemerintahan Bush dan Israel dimana AS juga menunda pinjaman subsidi untuk Israel dengan tujuan untuk menekan Israel agar tidak meneruskan pembangunan pemukiman Yahudi, misalnya di wilayah koridor Jerusalem-Bethlehem. Jimmy Carter telah mengatakan bahwa pemukiman Yahudi di Jalur Gaza dan Tepi Barat merupakan penghambat besar untuk perdamaian. Pemerintahan Bush jr. yang biasanya mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah Israel juga mengatakan bahwa pemukiman Yahudi merupakan rintangan besar untuk perdamaian Israel-Palestina.

Walaupun dalam Kesepakatan Oslo tidak tercantum kewajiban Israel untuk menghentikan pemukiman Yahudi, Palestina mengatakan bahwa Israel telah merusak kesepakatan tersebut serta proses perdamaian yang coba digalakkan dengan terus membangun dan memperluas pemukiman Yahudi setelah penandatanganan Kesepakatan Oslo pada tahun 1993. Palestina juga menuduh Israel telah menyerang kamp-kamp pengungsi dan desa-desa untuk menakuti dan mengusir penduduk Palestina dan mengklaim tanah tersebut sebagai tanah Israel. Israel membenarkan tindakannya dengan mengatakan serangan-serangan yang dilakukan untuk melawan organisasi teroris, apabila tidak ada teroris maka tidak akan ada operasi militer.

Salah satu syarat utama untuk mencapai kesepakatan final antara Israel-Palestina adalah Israel harus menarik sejumlah besar pemukim Yahudi di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Keputusan Ariel Sharon untuk menarik semua pemukim Yahudi yang berjumlah sekitar 8000 Yahudi berasal dari 21 pemukiman Yahudi yang dimulai pada bulan Agustus 2005 merupakan bentuk tindakan untuk menunjukkan kepatuhan Israel kepada AS dan negara internasional. Konsep Roadmap yang dipelopori oleh AS dan PBB, Uni Eropa dan Rusia menjadi bentuk perwujudan dari tekanan internasional tersebut. Meskipun dalam Roadmap disebutkan bahwa pemerintah Israel harus menghentikan dan membekukan semua pemukiman yang ada di Jalur Gaza dan Tepi Barat, keputusan penarikan Sharon ditujukan untuk setidaknya mengurangi sedikit tekanan internasional yang bertubi-tubi yang diarahkan kepada pemerintahan Ariel Sharon dan negara Israel.

B. Roadmap

Konsep Roadmap (peta jalan damai) yang diprakarsai Amerika Serikat (AS) dan didukung oleh PBB, Uni Eropa dan Rusia yang disebut kuartet perantara perdamaian Timur Tengah merupakan upaya akhir dari rangkaian inisiatif damai yang bertujuan mengakhiri konflik berdarah di Timur Tengah, khususnya Israel-Palestina, setelah gagalnya inisiatif damai sebelumnya, seperti laporan komite George Mitchel dan konsep damai George Tenet.

Nilai konsep Roadmap menjadi sangat strategis, bukan hanya lantaran akan melahirkan negara Palestina pada tahun 2005, melainkan karena merupakan

bagian dari kebijakan politik baru AS di Timur Tengah pasca tragedi 11 September 2001 di New York dan Washington DC.

Dalam upaya AS membujuk pihak-pihak terkait bersedia menerima konsep damai tersebut, Deputy Menteri Luar Negeri AS urusan Timur Tengah William Burns mengadakan lawatan ke Timur Tengah pada Oktober 2002 untuk meminta pendapat para pemimpin kawasan tersebut tentang konsep damai itu. Hasil lawatan William Burns tersebut kemudian dilaporkan pada kuartet perantara perdamaian pada bulan Desember 2002 untuk dijadikan masukan baru dalam menetapkan draft final konsep damai itu.⁹¹

Konsep Roadmap tersebut berpedoman pada pidato Presiden AS George W Bush pada 24 Juni 2002 tentang solusi konflik Israel-Palestina terdiri atas tiga tahap yang akan berakhir dengan berdirinya negara Palestina.⁹²

- Tahap pertama, dari Oktober 2002 hingga Mei 2003 adalah berhentinya serangan Palestina, kembalinya koordinasi keamanan Israel-Palestina, pelaksanaan reformasi Palestina, penarikan pasukan Israel dari wilayah A di Tepi Barat, mencabut boikot atas kota-kota Palestina, dan pembekuan pembangunan permukiman Yahudi.
- Tahap kedua, dari Juni 2003 hingga Desember 2003 adalah proses lanjutan pelaksanaan reformasi Palestina dan penarikan pasukan Israel ke posisi sebelum meletusnya Intifada Al Aqsa pada 28 September 2000 serta kembalinya Dubes Mesir dan Jordania untuk Israel ke Tel Aviv. Selain itu,

⁹¹ <http://kompas.com/kompas%2Dcetak/0305/12/ln/303107.htm>

⁹² *Ibid.*

pada tahap kedua, akan digelar konferensi damai Timur Tengah pertama dan membahas tentang berdirinya negara Palestina dengan perbatasan sementara.

- Tahap ketiga, dari tahun 2004 hingga 2005 adalah menggelar konferensi damai Timur Tengah kedua dan mendeklarasikan berdirinya negara Palestina dengan perbatasan sementara. Konferensi damai tersebut juga membahas jalur Suriah-Israel dan Lebanon-Israel.

Pasca pendeklarasian negara Palestina sementara, akan langsung dibuka perundingan membahas isu-isu krusial seperti status Kota Jerusalem, permukiman Yahudi, pengungsi Palestina dan perbatasan akhir negara Palestina-Israel yang diproyeksikan berakhir pada tahun 2005. Pasca tercapainya kesepakatan final Israel-Palestina, seluruh negara Arab membuka hubungan diplomatik dengan Israel sesuai dengan proposal damai Arab yang disahkan pada forum KTT Arab di Beirut bulan Maret 2002.

Roadmap memberi peluang baru bagi bergeraknya proses perdamaian di Timur Tengah yang amburadul sejak meletusnya intifadah Al Aqsa pada 28 September 2000. Lebih dari itu, konsep damai tersebut untuk mencegah upaya PM Israel Ariel Sharon menguburkan inisiatif damai apa pun, seperti nasib komite George Mitchel dan konsep George Tenet.

Pelaksanaan Roadmap akan beralih dari satu tahap ke lain tahap, harus melalui proses evaluasi dan mendapat persetujuan kuartet perantara perdamaian. Hal itu merupakan harapan adanya penilaian netral karena kuartet perantara perdamaian itu beranggotakan sejumlah negara dan PBB.

Berbeda halnya dengan Kesepakatan Oslo tahun 1993 yang penilaiannya diserahkan kepada Israel dan Palestina sendiri, yang mengakibatkan selalu terjadi perbedaan pendapat antara pihak yang bersengketa itu. Suatu hal yang membuka peluang pada pemerintah kanan Israel sejak era PM Benjamin Netanyahu hingga PM Ariel Sharon mencampakkan Kesepakatan Oslo itu.

Dengan adanya persetujuan AS atas pengiriman pengawas internasional ke tanah Palestina, Roadmap bisa benar-benar menjadi jalan menuju penyelesaian politik jika ada jadwal pelaksanaan yang jelas dan jaminan komitmen Israel melaksanakan konsep damai tersebut.

Tiga tahapan yang terkandung dalam konsep peta damai sesungguhnya tidak berbeda dari konsep George Tenet dan laporan komite George Mitchel. Yakni, pertama, terciptanya keamanan. Kedua, perundingan untuk mencapai solusi bertahap atau sementara. Ketiga, perundingan mencari solusi permanen. Problema terbesar adalah tidak adanya mekanisme yang bisa disepakati bersama untuk beralih dari satu ke lain tahapan. Misalnya, konsep George Tenet mengandung proses menciptakan keamanan dahulu yang telah diterima dan dilakukan Palestina. Namun, hal itu tidak dapat diwujudkan karena tidak adanya komitmen dari kedua belah pihak. Hal yang sama terjadi pada laporan komite George Mitchel. Pada laporan komite itu harus dilakukan dahulu pembangunan rasa saling percaya dan kemudian menggelar perundingan, tetapi Israel-Palestina sering tidak mengindahkan proses tersebut.⁹³

⁹³ http://newsvote.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/2938444.stm

Konsep Roadmap juga menyinggung soal konferensi damai internasional, namun tidak ada penjelasan yang cukup tentang peserta yang terlibat dalam konferensi itu dan pijakan serta tujuan konferensi tersebut.

Konsep Roadmap juga menegaskan proses perundingan akan berlangsung selama tiga tahun dan akan berakhir dengan berdirinya negara Palestina pada tahun 2005. Namun, tidak ada penjelasan, apa rujukan perundingan akhir nanti pada tahun 2005.

Otoritas Palestina pimpinan Yasser Arafat sejak awal menyambut positif konsep Roadmap tersebut dengan sejumlah koreksi, sebagai harapan akhir Bergeraknya kembali proses perdamaian.

Otoritas Palestina dan faksi Fatah menggelar dialog dengan Hamas dan faksi-faksi Palestina lain pada November 2002 di Cairo sebagai bagian dari upaya mengakhiri aksi kekerasan terhadap Israel. Upaya mengakhiri aksi kekerasan terhadap sasaran Israel itu merupakan salah satu butir penting dalam pelaksanaan tahap pertama konsep Roadmap tersebut. Hal itu menjadi tuntutan utama AS dan Israel sebagai pintu pembuka bagi pelaksanaan butir-butir lainnya.

Otoritas Palestina dan negara Arab semacam Mesir menganggap tidak mungkin bisa menghentikan aksi kekerasan tanpa ada kesepakatan dengan Hamas. Hamas dan faksi radikal Palestina lainnya merupakan tulang punggung perlawanan Palestina terhadap Israel selama meletusnya intifadah Al Aqsa sejak 28 September 2000.

Dialog faksi-faksi Palestina dengan sponsor Mesir masih terus berlanjut hingga saat ini untuk mencari pola ideal mengakhiri aksi kekerasan terhadap

Israel. Sedang sikap Israel atas Roadmap sejak semula cenderung menolak. Namun, akhirnya berkat tekanan AS, Israel menerima dengan mengajukan sejumlah koreksi.

Pejabat Israel semacam PM Ariel Sharon dan Menlu Silvan Shalom menegaskan, Palestina harus memerangi infrastruktur teroris terlebih dahulu sebagai bagian dari pelaksanaan tahap pertama konsep peta jalan damai. PM Sharon kemudian menambah syarat baru, yaitu Palestina harus mencabut tuntutan hak kembali pengungsi Palestina ke wilayah negara Israel sekarang untuk dapat mencapai kesepakatan damai mendatang. Artinya, Israel telah mengajukan prasyarat tertentu sebelum memulai pelaksanaan peta jalan damai. Padahal, isu hak kembali pengungsi Palestina akan dibahas pada tahap akhir pelaksanaan peta jalan damai itu.⁹⁴

Sikap negara-negara Arab beragam atas konsep Roadmap tersebut. Mesir dan Jordania mendukung konsep damai itu dengan sejumlah koreksi. Suriah cenderung menolaknya, meskipun tidak terang-terangan.

Sidang komite Liga Arab yang digelar di Damascus pada bulan November 2002 tidak mengambil sikap tegas atas konsep Roadmap itu. Sidang komite tersebut tetap menegaskan berpegang teguh terhadap proposal damai Arab yang diputuskan pada KTT Arab di Beirut bulan Maret 2002.

Sulit memahami konteks peluncuran dan peluang keberhasilan konsep peta jalan damai mewujudkan penyelesaian politik komprehensif di Timur Tengah tanpa diletakkan dalam kerangka kebijakan politik baru AS di kawasan itu. Hal

⁹⁴ *Ibid.*

tersebut menyusul tragedi 11 September 2001 dan deklarasi perang AS terhadap teroris dan Irak serta upaya mempromosikan nilai-nilai demokrasi.

Isu perdamaian Timur Tengah selalu mendapat prioritas utama dalam kebijakan Pemerintah AS dari masa ke masa, khususnya pada era pemerintahan Presiden Bill Clinton. Isu itu juga mengalami penyusutan cukup signifikan pada era pemerintahan Presiden George W Bush saat ini.

Persepsi dan orientasi kebijakan pemerintahan Presiden Bush atas perdamaian berubah, yakni dari isu perdamaian adil dan menyeluruh menjadi perdamaian secara bertahap dengan gencatan senjata jangka panjang untuk menciptakan keamanan dan stabilitas regional.

Perubahan orientasi tersebut bertujuan mengubah peta hubungan regional di kawasan Timur Tengah yang diwarnai dengan suatu ketenangan dan keamanan yang bertumpu pada redamnya intifada Al Aqsa. Serta terhentinya aksi kekerasan, khususnya serangan bunuh diri Palestina.

Tentu tidak dapat dipisahkan antara invasi AS ke Irak dan konflik Timur Tengah. Invasi AS ke Irak sesungguhnya tidak hanya bertujuan menghancurkan senjata pemusnah massal dan menggulingkan kekuasaan Saddam Hussein di Baghdad, tetapi bagian dari rencana besar AS mengubah peta Timur Tengah.

Konsep Roadmap yang dipromosikan sejak akhir tahun 2002 itu sebagai upaya AS untuk memberi kesan-sebelum invasi AS ke Irak dimulai-bahwa Washington serius ingin menyelesaikan isu Palestina melalui peta damai tersebut. Hal ini selalu diyakinkan Washington pada para pemimpin Timur Tengah untuk

mencari simpati mereka dan sekaligus agar tidak memicu kemarahan mereka tentang rencana invasi AS ke Irak itu.

Tragedi 11 September 2001 di AS yang disusul dengan deklarasi perang Washington atas teroris telah membawa dampak negatif atas isu Palestina. Dalam konteks ini, Israel berhasil memanfaatkan tragedi 11 September itu untuk menciptakan opini bahwa aksi perlawanan dan serangan bunuh diri Palestina merupakan aksi teroris.

Israel selalu mengklaim membantu AS dalam aksi memerangi teroris. AS pun mengadopsi klaim Israel tersebut, yang membuat posisi Israel berada di atas angin pasca tragedi 11 September 2001.

Konsekuensi atas perubahan kebijakan AS itu adalah mengantarkan Washington memberi izin Israel untuk mengisolir Yasser Arafat di markas besarnya di Ramallah sejak bulan Desember 2001 hingga Mei 2002. Serta mengutuk perlawanan Palestina, bahkan menamakan agresi Israel ke Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai aksi mempertahankan diri.

Perubahan lain dari kebijakan AS di Timur Tengah itu adalah seruan Menlu AS Colin Powell akhir tahun 2002 tentang perlunya dilakukan demokratisasi dan reformasi politik di Timur Tengah. Powell meminta diciptakan kebebasan politik, sosial, budaya, hingga dapat membantu meningkatkan tingkat kehidupan penduduk kawasan itu dan pada gilirannya bisa mencegah bahaya pengangguran.

Akan tetapi, orientasi baru AS itu mengundang kritik dari kalangan pejabat maupun intelektual Arab. AS dituduh sengaja ingin memalingkan

perhatian dari persoalan yang sebenarnya, yakni tuntutan menerapkan kebijakan yangimbang dan adil terhadap konflik Arab-Israel.

Salah satu faktor utama gagalnya inisiatif damai sebelum ini dan kemungkinan juga konsep Roadmap adalah keberpihakan AS terhadap Israel. Ada beberapa faktor keberpihakan AS atas Israel selama ini.

Pertama, adanya kesamaan pemikiran antara elit di Israel dan AS. Di AS, misalnya, saat ini politik luar negeri bukan semata dominasi Departemen Luar Negeri, tetapi turut mengendalikan pula Departemen Pertahanan, Lembaga Penasihat Keamanan Nasional dan Gedung Putih. Sedang nama-nama elit, seperti Menhan Donald Rumsfeld, Penasihat Keamanan Condoleezza Rice, dan Wapres Dick Cheney dikenal kelompok garis keras yang sealiran dengan Partai Likud.

Sedang politik luar negeri Israel kini didominasi tokoh-tokoh garis keras pula semacam PM Ariel Sharon, Menhan Shaul Mofaz, dan Kepala Staf AB Israel Moshe Ayalon. Selain itu, keberpihakan AS atas Israel lantaran peran secara samar maupun terang-terangan lobi Yahudi pada lembaga-lembaga riset di seantero AS.

Karena itu, keputusan Kongres AS pada September 2002 yang menganggap Kota Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan warga AS yang lahir di Kota Jerusalem dicatat lahir di Israel, merupakan titik balik sikap AS atas isu Kota Jerusalem. Keputusan tersebut bahkan lalu mendapat pengesahan dari Presiden Bush, meskipun Pemerintah AS menyebut keputusan itu tidak mengikat.⁹⁵

⁹⁵ http://en.wikipedia.org/wiki/Category:U.S.-Israeli_relations

Perubahan secara mendasar sikap Kongres dan Pemerintah AS tentu merupakan titik kulminasi dari perjuangan Kongres yang sejak tahun 1995 meminta Kedubes AS di Israel dipindah dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Konsep Roadmap kini dipromosikan dalam konteks perubahan kebijakan politik AS di Timur Tengah itu, yang semakin ditandai hegemoni AS di kawasan tersebut. Karena itu, nasib konsep Roadmap sangat bergantung pada niat baik AS, sebagai satu-satunya negara adidaya yang mampu menekan Israel. Roadmap juga sebagai bentuk perwujudan tekanan-tekanan internasional yang ditujukan kepada pemerintahan Ariel Sharon agar memulai kembali kesepakatan final antara Israel dan Palestina sejak Perundingan Final Camp David II tahun 2000.